



PENGADILAN AGAMA MASOHI

KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Nomor : W24-A2/855.a/OT.01.1/XII/2018

TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASOHI TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviw Rencana Strategis Pengadilan Agama Masohi Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
- c. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Masohi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
12. Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASOHI TAHUN 2018**
- KESATU : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H
NIP. 19610906 199202 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Nomor : W24-A2/855.a/KU.02.1/XII/2018

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASOHI TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBINA : Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

PENANGGUNG JAWAB : Miftahul Huda, S.Ag

PENGARAH : Siti Zainab Pelupessy, S.Hi., M.H
Dra. Alawiah Mony

KOORDINATOR : Emy Sabar, S.Hi

ANGGOTA : Anisa Latuconsina, S.Hi
Sarmada Tuasikal, S.Ag

Nur Ida Tualeka, S.H

Harniansi Baharuddin, S.E

Suharti S.Kom

Gunawan, A.Md

Syamsul Arif Mony

Masohi, 31 Desember 2018

Ketua

ABU BAKAR GAIT, S.Ag., M.H
NIP. 19610906 199202 1 002

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{12}{12} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Menyelesaikan Perkara sesuai waktu	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{16}{257} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Menyelesaikan seluruh sisa perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn} \times 100\%$ $\frac{16 - 12}{12} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Putusan yang dijatuahkan pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah diterima Peggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon	d. Persentase perkara yang tidak megajukan upaya Hukum:	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{245}{245} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Penerimaan Putusan tepat waktu	a. Persentase isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{257}{245} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Mengupayakan penyelesaian perkara dalam mediasi.	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ $\frac{26}{26} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Putusan yang dijatuuhkan pada tingkat pertama telah sesuai dan telah diterima oleh Penggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Menyelesaikan perkara yang menarik perhatian masyarakat	d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara oneline dalam waktu 1 hari sejak putusan	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syari'ah yang diupload dalam Website}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meberikan akses Peradilan pada masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{12}{12} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan akses Peradilan seluas luasnya pada masyarakat pedalaman	b. Persentase isi perkara yang diselesaikan diluar gedung	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $\frac{144}{156} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan kemudahan dan akses pada masyarakat pedalaman	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ $\frac{213}{241} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan akses pada masyarakat dalam keadilan dengan Layanan Bantuan Hukum secara gratis	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Memberikan pelayanan Cepat, tepat dan biaya ringan kepada pencari keadilan	Persentase putusan perdata yang di tindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $\frac{241}{213} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Masohi, 31 Desember 2018



ABU NAKAR GAITE, S.Ag., M.H
NIP. 19610906 199202 1 002